

**STUDI KESIAPAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
MENGHADAPI TRANSFORMASI DIGITAL PADA KANTOR
KELURAHAN TANJUNG SELOR HULU**



PROPOSAL SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Kaltara

Disusun Oleh:

NAZWA BANSIR

202251008

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2026**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Manfaat Teoritis	6
1.3.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pembatasan Konsep	8
2.1.1 Transformasi Digital dalam Pemerintahan	8
2.1.2 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Sumber Daya Pemerintah.....	9
2.1.3 Kesiapan ASN dalam Menghadapi Transformasi Digital	10
2.2 Penelitian Terdahulu	11
2.3 Kajian Teoritis	16
2.3.1 Teori Transformasi Digital Pemerintahan.....	17
2.3.2 Teori Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	18
2.3.3 Teori Sumber Daya Manusia Aparatur	19
2.4 Kerangka Berpikir	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	22
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian	22
3.2 Jenis Penelitian	22

3.3 Data Dan Sumber Data	23
3.4 Fokus Penelitian	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data	26
3.6 Uji Validitas Data	28
3.7 Teknik Analisis Data.....	29
DAFTAR PUSTAKA.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital telah menjadi agenda strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan modern sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dalam perspektif administrasi publik, transformasi digital dipahami sebagai proses perubahan tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan, serta keterbukaan informasi publik. Pemerintah di berbagai negara menjadikan digitalisasi sebagai instrumen reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan global. Menurut OECD (2016), transformasi digital pemerintahan bukan sekadar penggunaan teknologi, melainkan perubahan menyeluruh terhadap cara kerja, budaya organisasi, dan orientasi pelayanan publik. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi kebutuhan mendasar dalam upaya meningkatkan kinerja sektor publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Di Indonesia, transformasi digital pemerintahan secara resmi didorong melalui berbagai kebijakan nasional, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk

mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya kebijakan ini, digitalisasi pemerintahan tidak lagi bersifat pilihan, melainkan menjadi kewajiban bagi setiap unit kerja pemerintah hingga tingkat paling bawah, termasuk kelurahan. Hal ini menegaskan bahwa transformasi digital merupakan bagian dari reformasi birokrasi nasional yang harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan (Perpres No. 95 Tahun 2018).

Keberhasilan implementasi transformasi digital dalam pemerintahan sangat ditentukan oleh kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana utama kebijakan publik. ASN memiliki peranan strategis dalam merencanakan, mengelola, dan menjalankan pelayanan publik berbasis digital. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa ASN dituntut untuk memiliki kompetensi, profesionalisme, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. ASN tidak hanya dituntut mampu mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga harus memahami perubahan pola kerja dan budaya organisasi yang berbasis digital. Dengan demikian, kualitas sumber daya ASN menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan transformasi digital pemerintahan (UU No. 5 Tahun 2014).

Penerapan transformasi digital dalam pemerintahan diharapkan memberikan berbagai manfaat, antara lain peningkatan efisiensi proses administrasi, percepatan pelayanan publik, pengelolaan data yang lebih akurat, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur. Penelitian yang dilakukan oleh Indrajit (2006) menunjukkan bahwa e-government mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik apabila didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu, studi Pratama (2021) dalam Jurnal Administrasi Publik menyebutkan bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan ASN dalam memahami dan mengoperasikan sistem digital. Oleh karena itu, transformasi digital tidak hanya berdampak pada sistem pelayanan, tetapi juga pada peningkatan kinerja aparatur dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi transformasi digital pemerintahan masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan kesiapan ASN. Beberapa persoalan yang sering ditemui meliputi rendahnya literasi digital aparatur, keterbatasan pelatihan teknologi informasi, resistensi terhadap perubahan sistem kerja, serta belum optimalnya pemanfaatan aplikasi pelayanan publik. Penelitian Sari dan Wibowo (2023) dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara menunjukkan bahwa ketidaksiapan sumber daya ASN menjadi salah satu faktor utama penghambat implementasi SPBE di tingkat pemerintahan daerah. Kondisi ini mengakibatkan sistem digital yang telah

disediakan tidak dimanfaatkan secara maksimal dan belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara optimal.

Pada tingkat pemerintahan daerah, khususnya kelurahan, ASN memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kelurahan merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan tugas pemerintahan umum. Dalam era transformasi digital, ASN kelurahan dituntut untuk mampu mengimplementasikan pelayanan publik berbasis digital, seperti penggunaan aplikasi administrasi kependudukan, sistem surat-menyurat elektronik, dan media komunikasi daring. Tuntutan tersebut memerlukan kesiapan ASN baik dari aspek kompetensi, sikap, maupun dukungan organisasi (UU No. 23 Tahun 2014).

Kelurahan Tanjung Selor Hulu sebagai bagian dari pemerintahan daerah juga dihadapkan pada tuntutan implementasi transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, berdasarkan pengamatan awal, masih terdapat indikasi bahwa pemanfaatan teknologi digital belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan ASN. Keterbatasan kompetensi digital, minimnya pelatihan berkelanjutan, serta adaptasi terhadap sistem kerja digital menjadi permasalahan yang berpotensi menghambat efektivitas pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan transformasi digital yang

telah ditetapkan pemerintah dengan kemampuan ASN dalam melaksanakannya di tingkat kelurahan (Hidayat & Lestari, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam transformasi digital pemerintahan terletak pada kesiapan dan kapasitas ASN, khususnya di tingkat kelurahan. Ketidaksiapan ASN berpotensi mengurangi manfaat transformasi digital dan menghambat pencapaian tujuan SPBE. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mendalam mengenai Aparatur Sipil Negara dalam menghadapi transformasi digital pada Kelurahan Tanjung Selor Hulu untuk mengidentifikasi kondisi aktual ASN, permasalahan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan ASN dalam beradaptasi dengan sistem digital.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi Aparatur Sipil Negara dalam menghadapi transformasi digital pada Kelurahan Tanjung Selor Hulu, mengidentifikasi permasalahan serta faktor pendukung dan penghambat, serta memberikan gambaran mengenai kebutuhan pengembangan kompetensi ASN. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan strategi peningkatan kapasitas ASN guna mendukung terwujudnya pelayanan publik kelurahan yang efektif, efisien, transparan, dan berbasis teknologi digital.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesiapan Aparatur Sipil Negara dalam menghadapi transformasi digital pada Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hulu?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kesiapan Aparatur Sipil Negara dalam menghadapi transformasi digital pada Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan Aparatur Sipil Negara dalam menghadapi transformasi digital pada Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hulu.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat kesiapan Aparatur Sipil Negara dalam menghadapi transformasi digital pada Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.3.1 Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan peran dan kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi transformasi digital pemerintahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman konseptual mengenai keterkaitan antara sumber daya aparatur, kompetensi ASN, dan implementasi transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat pemerintahan kelurahan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dan bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik

transformasi digital, e-government, serta pengelolaan sumber daya aparatur dalam konteks pemerintahan daerah.

1.3.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi Pemerintah Kelurahan Tanjung Selor Hulu, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui kondisi aktual ASN dalam menghadapi transformasi digital, termasuk kompetensi, kendala, dan kebutuhan pengembangan aparatur. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan program peningkatan kapasitas ASN, khususnya melalui pelatihan dan pendampingan transformasi digital di tingkat kelurahan. Selain itu, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara tidak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berbasis teknologi digital.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembatasan Konsep

Pembatasan konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan fokus dan arah yang jelas agar pembahasan tidak melebar serta tetap sesuai dengan tujuan penelitian. Mengingat transformasi digital merupakan konsep yang luas, maka penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi transformasi digital pada Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hulu. ASN yang dimaksud adalah aparatur kelurahan yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Konsep transformasi digital dalam penelitian ini dibatasi pada penerapan teknologi digital dalam proses pelayanan publik dan administrasi pemerintahan kelurahan, seperti penggunaan sistem administrasi berbasis elektronik, aplikasi pelayanan publik, dan media komunikasi digital. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis pengembangan sistem teknologi informasi secara mendalam, melainkan menitikberatkan pada kesiapan ASN dalam mengoperasikan, memanfaatkan, dan menyesuaikan diri dengan sistem digital tersebut.

2.1.1 Transformasi Digital dalam Pemerintahan

Transformasi digital dalam pemerintahan merupakan proses perubahan tata kelola, sistem kerja, dan mekanisme pelayanan publik

melalui pemanfaatan teknologi digital secara terintegrasi. OECD (2016) menjelaskan bahwa transformasi digital pemerintah tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, tetapi juga mencakup perubahan budaya organisasi, pola kerja aparatur, serta orientasi pelayanan yang berpusat pada masyarakat. Dalam konteks administrasi publik, transformasi digital dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Di Indonesia, transformasi digital pemerintahan diatur secara formal melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya kebijakan ini, seluruh instansi pemerintah, termasuk kelurahan, diwajibkan untuk mengimplementasikan sistem digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.2 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Sumber Daya Pemerintah

Aparatur Sipil Negara merupakan unsur utama sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu

bangsa. Dalam menghadapi transformasi digital, ASN dituntut untuk memiliki kompetensi profesional, integritas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Sedarmayanti (2017), kualitas sumber daya aparatur sangat menentukan keberhasilan organisasi publik dalam mencapai tujuan pelayanan. ASN tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis penggunaan teknologi, tetapi juga sikap terbuka terhadap perubahan, kemauan belajar, serta kemampuan bekerja dalam sistem digital. Dengan demikian, kesiapan ASN menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi transformasi digital pemerintahan.

2.1.3 Kesiapan ASN dalam Menghadapi Transformasi Digital

Kesiapan ASN dalam menghadapi transformasi digital dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain kompetensi digital, sikap terhadap perubahan, dukungan organisasi, serta ketersediaan sarana dan prasarana teknologi. Indrajit (2006) menyatakan bahwa keberhasilan e-government sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia sebagai pengelola dan pengguna sistem digital. Tanpa kesiapan aparatur, sistem digital yang tersedia tidak akan berfungsi secara optimal.

Penelitian Pratama (2021) menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan minimnya pelatihan menjadi faktor utama yang menghambat implementasi digitalisasi pelayanan publik. Hal ini diperkuat oleh Sari dan

Wibowo (2023) yang menyimpulkan bahwa ketidaksiapan ASN di tingkat daerah masih menjadi persoalan serius dalam penerapan SPBE. Oleh karena itu, kajian mengenai kesiapan ASN menjadi penting untuk mengetahui kondisi aktual serta faktor pendukung dan penghambat transformasi digital di tingkat kelurahan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam suatu penelitian ilmiah karena berfungsi untuk menunjukkan posisi penelitian yang akan dilakukan di antara penelitian-penelitian sebelumnya. Melalui kajian penelitian terdahulu, peneliti dapat memahami perkembangan kajian yang telah dilakukan, menemukan konsep, variabel, serta pendekatan yang relevan, dan menghindari pengulangan penelitian yang sama. Selain itu, penelitian terdahulu juga membantu peneliti dalam memperkuat dasar teori dan argumen ilmiah yang digunakan dalam penelitian, khususnya yang berkaitan dengan transformasi digital, aparatur pemerintah, dan pelayanan publik.

Dalam konteks penelitian mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi transformasi digital, penelitian terdahulu memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan aparatur, seperti kompetensi digital, dukungan organisasi, kebijakan pemerintah, serta budaya kerja birokrasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi e-government atau SPBE tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi

sangat bergantung pada kualitas sumber daya aparatur sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, penelitian terdahulu menjadi rujukan penting untuk memperkuat fokus penelitian ini, sekaligus menunjukkan perbedaan dan kontribusi penelitian yang dilakukan pada tingkat kelurahan, khususnya di Kelurahan Tanjung Selor Hulu.

Berikut ini sajian beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian mengenai kesiapan ASN dalam menghadapi transformasi digital.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama/Judul	Hasil Penelitian	Persamaan Perbedaan
1.	Ahmad Hariri dkk. (2020) Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Transformasi Digital Layanan Kesehatan	Kompetensi digital, pelatihan, dan sikap terhadap teknologi berpengaruh signifikan terhadap kesiapan SDM	Sama-sama membahas kesiapan SDM dalam transformasi digital pelayanan public Fokus penelitian pada tingkat desa, sedangkan penelitian ini pada instansi pelayanan publik secara umum
2.	Syamsuddin, Y., Muthalib, A. A.,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital da-	Penelitian ini memiliki kesamaan fokus pada

NO	Nama/Judul	Hasil Penelitian	Persamaan Perbedaan
	Putera, A., & Asraf (2025) Judul: Transformasi Digital dan Kesiapan SDM UPTD PPA Provinsi Sulawesi Tenggara.	<p>lam pelayanan publik di UPTD PPA sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia. Kesiapan tersebut meliputi literasi digital, kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru, serta dukungan kebijakan dan kepemimpinan organisasi. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun infrastruktur digital mulai tersedia, keterbatasan kompetensi SDM masih menjadi tantangan utama dalam implementasi layanan digital.</p>	<p>kesiapan SDM publik dalam menghadapi transformasi digital pelayanan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana penelitian tersebut berfokus pada UPTD PPA, sedangkan penelitian ini menelaah kesiapan SDM pelayanan publik secara lebih umum.</p>
3.	Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W.	<p>Berdasarkan hasil penelitian serta perbandingan dengan penelitian terdahulu,</p>	<p>penelitian menegaskan bahwa kesiapan sumber daya manusia aparatur</p>

NO	Nama/Judul	Hasil Penelitian	Persamaan Perbedaan
	(2024). Trans- formasi Pemerintahan Digital: Tan- tangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis El- elektronik (SPBE) di Indonesia..	penelitian ini memperkuat temuan bahwa kesiapan sum- ber daya manusia merupakan faktor penentu dalam keber- hasilan transformasi digital pelayanan publik. Penelitian ini juga memberikan kontri- busi dengan menyoroti per- lunya integrasi antara kompe- tensi digital, sikap adaptif apa- ratur, dan dukungan organisasi agar transformasi digital dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.	merupakan faktor kunci keberhasilan implementa- si SPBE. Selain itu, keterbatasan kompetensi digital, perlunya pelatihan ASN, serta budaya kerja birokrasi yang belum adaptif terhadap sistem digital menjadi hambatan utama dalam transformasi digital pelayanan publik.
4.	Muhamad Hanan Rahmadi, Elis Teti Rusmiati Transformasi Digital Mana-	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital da- lam manajemen SDM aparatur meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi, dan	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kesimpulan bahwa kesi- apan sumber daya manusia aparatur merupakan faktor

NO	Nama/Judul	Hasil Penelitian	Persamaan Perbedaan
	jemen SDM di Instansi Pemerintah: Adaptasi, Tantangan, dan Peluang	akuntabilitas kinerja melalui penerapan sistem digital seperti e-Kinerja dan SIMPEG. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kompetensi dan literasi digital ASN, resistensi terhadap perubahan, serta ketimpangan infrastruktur teknologi.	kunci keberhasilan transformasi digital, di mana kompetensi digital, pelatihan berkelanjutan, dan perubahan budaya kerja birokrasi menjadi unsur penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
5.	Rahmadi & Rusmiati (2025) Analisis Transformasi Digital dalam Administrasi Publik dan Manajemen SDM	Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam administrasi publik dan manajemen sumber daya manusia memberikan dampak positif terhadap efisiensi birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja aparatur.	Persamaan terletak pada fokus kajian yang sama-sama menekankan bahwa kesiapan sumber daya manusia aparatur merupakan faktor kunci dalam keberhasilan transformasi digital di sektor publik. Kedua penelitian mene-

NO	Nama/Judul	Hasil Penelitian	Persamaan Perbedaan
			gaskan bahwa kompetensi digital, pelatihan berkelanjutan, dan perubahan budaya kerja birokrasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesiapan sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan transformasi digital pelayanan publik. Namun, masih terdapat celah penelitian terkait integrasi kompetensi digital, budaya kerja, dan inovasi pelayanan publik yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

2.3 Kajian Teoritis

Kajian teoritis dalam penelitian ini disusun sebagai landasan konseptual untuk memahami secara sistematis berbagai konsep, teori, dan kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi transformasi digital pemerintahan. Kajian teori berfungsi untuk memberikan arah dan batasan konseptual terhadap variabel yang diteliti, sehingga analisis yang

dilakukan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Selain itu, kajian teoritis membantu peneliti dalam menginterpretasikan temuan lapangan secara objektif dan terstruktur.

Dalam konteks penelitian ini, kajian teoritis difokuskan pada konsep administrasi publik, transformasi digital pemerintahan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sumber daya aparatur, serta kesiapan ASN dalam menghadapi perubahan berbasis teknologi. Pemilihan teori-teori tersebut didasarkan pada relevansinya dengan permasalahan penelitian, yaitu bagaimana kesiapan ASN di Kelurahan Tanjung Selor Hulu dalam menghadapi transformasi digital, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses tersebut. Dengan adanya kajian teoritis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran ASN dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan berbasis teknologi digital.

2.3.1 Teori Transformasi Digital Pemerintahan

Transformasi digital pemerintahan merupakan proses perubahan menyeluruh dalam sistem pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital. OECD (2016) menjelaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar penerapan teknologi, melainkan perubahan cara kerja organisasi, struktur kelembagaan, budaya birokrasi, dan orientasi pelayanan publik. Dengan transformasi digital, pemerintah diharapkan mampu memberikan

pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam praktiknya, transformasi digital pemerintahan menuntut kesiapan sumber daya manusia sebagai penggerak utama perubahan. Aparatur pemerintah harus mampu beradaptasi dengan teknologi baru dan perubahan sistem kerja digital. Tanpa kesiapan aparatur, transformasi digital berisiko tidak berjalan optimal meskipun infrastruktur teknologi telah tersedia. Oleh karena itu, teori transformasi digital relevan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kesiapan ASN dalam menghadapi perubahan digital di tingkat kelurahan.

2.3.2 Teori Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan kebijakan nasional yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. SPBE mencakup layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi secara digital.

Keberhasilan penerapan SPBE sangat bergantung pada kesiapan aparatur pemerintah sebagai pengguna sistem. Aparatur dituntut memiliki

kemampuan teknis, pemahaman sistem, dan sikap positif terhadap perubahan digital. Jika ASN tidak siap, maka implementasi SPBE berpotensi tidak berjalan maksimal dan tujuan kebijakan tidak tercapai. Oleh karena itu, teori SPBE digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar untuk menganalisis hubungan antara kebijakan digital pemerintah dan kesiapan ASN di Kelurahan Tanjung Selor Hulu.

2.3.3 Teori Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber daya manusia aparatur merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan organisasi pemerintahan. Menurut Hasibuan (2017), sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu untuk melaksanakan pekerjaan. Dalam organisasi pemerintahan, kualitas aparatur sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan kualitas pelayanan publik.

Dalam era transformasi digital, sumber daya aparatur tidak hanya dituntut memiliki kompetensi administratif, tetapi juga kompetensi digital dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Aparatur yang memiliki keterampilan dan pengetahuan digital akan lebih mampu mendukung implementasi SPBE dan pelayanan publik berbasis teknologi. Oleh karena itu, teori sumber daya manusia aparatur digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kapasitas ASN dalam menghadapi transformasi digital di lingkungan kelurahan.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari adanya kebijakan nasional transformasi digital pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan tersebut mewajibkan seluruh instansi pemerintah, termasuk kelurahan, untuk menerapkan sistem pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Implementasi SPBE menuntut terjadinya perubahan sistem kerja dan pola pelayanan publik yang sebelumnya bersifat manual menjadi berbasis digital.

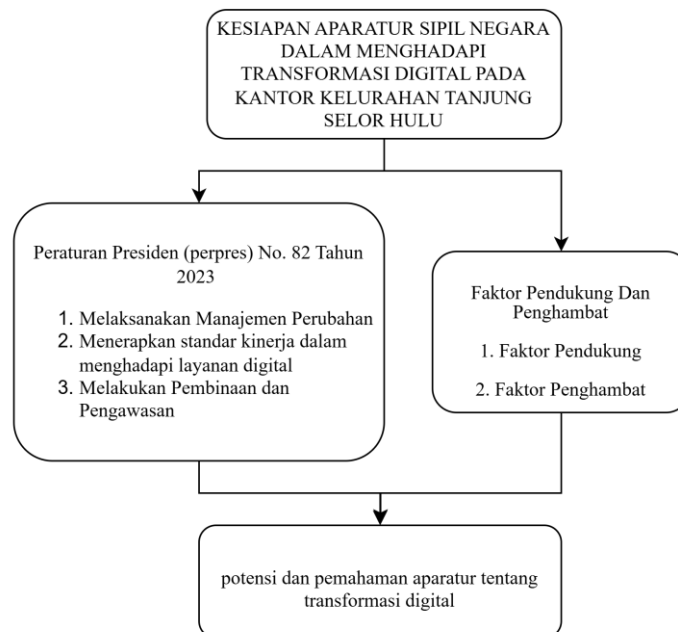
Dalam pelaksanaannya, keberhasilan transformasi digital pemerintahan sangat ditentukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana utama kebijakan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, aparatur dituntut memiliki kompetensi, profesionalisme, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, kesiapan ASN menjadi faktor kunci dalam menghadapi transformasi digital, yang mencakup kompetensi digital, sikap terhadap perubahan, serta pemahaman terhadap sistem pelayanan berbasis elektronik.

Kesiapan ASN dalam menghadapi transformasi digital dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat, seperti pelatihan dan pengembangan kompetensi, dukungan pimpinan, ketersediaan sarana dan prasarana teknologi, serta tingkat literasi digital aparatur. Faktor-faktor tersebut akan menentukan

sejauh mana implementasi SPBE dapat berjalan secara optimal di Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hulu.

Selanjutnya, tingkat kesiapan ASN dan pengaruh faktor pendukung serta penghambat tersebut berdampak langsung pada implementasi SPBE dan kualitas pelayanan publik. Apabila ASN memiliki kesiapan yang baik, maka transformasi digital dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Sebaliknya, rendahnya kesiapan ASN dapat menghambat pelaksanaan transformasi digital dan mengurangi manfaat yang diharapkan dari penerapan SPBE di tingkat kelurahan.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kelurahan Tanjung Selor Hulu merupakan salah satu unit pemerintahan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat serta memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, kelurahan ini juga sedang dihadapkan pada tuntutan penerapan transformasi digital pemerintahan sesuai dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 2 bulan. Rentang waktu tersebut mencakup tahapan persiapan penelitian, pengumpulan data di lapangan, pengolahan dan analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Penentuan waktu ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian serta ketersediaan waktu peneliti dan informan di lokasi penelitian.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara holistik dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa, sehingga peneliti dapat menggali makna dan proses yang terjadi di lapangan secara mendalam. Pendekatan deskriptif

digunakan karena penelitian ini berfokus pada upaya menggambarkan kondisi aktual sumber daya aparatur pemerintah dalam menghadapi transformasi digital pada Kelurahan Tanjung Selor Hulu tanpa melakukan pengujian hipotesis. Sejalan dengan pendapat Sugiyono (2019), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu fenomena sebagaimana adanya, sehingga pendekatan ini dinilai tepat untuk menjelaskan kompetensi aparatur serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pelayanan publik berbasis digital di tingkat kelurahan.

3.3 Data Dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang digunakan untuk menganalisis kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi transformasi digital pada Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hulu. Penggunaan data primer dan sekunder dilakukan agar peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif, baik dari kondisi empiris di lapangan maupun dari kerangka normatif dan teoritis yang relevan. Menurut Sugiyono (2019), penggunaan lebih dari satu jenis data bertujuan untuk meningkatkan ketepatan dan kedalaman analisis dalam penelitian kualitatif.

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian melalui interaksi langsung dengan informan. Menurut Moleong (2021), data primer dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian secara mendalam. Dalam penelitian

ini, data primer diperoleh dari ASN yang bekerja di Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hulu dan terlibat langsung dalam pelayanan publik serta penerapan sistem berbasis digital. Data primer mencakup informasi mengenai pemahaman ASN terhadap transformasi digital, kemampuan penggunaan teknologi informasi, pengalaman dalam penerapan pelayanan berbasis elektronik, serta pandangan ASN mengenai faktor pendukung dan penghambat transformasi digital di lingkungan kelurahan.

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Menurut Arikunto (2018), data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer serta memberikan landasan teoritis dan normatif dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi instansi pemerintah, laporan kegiatan, serta buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan administrasi publik, transformasi digital, SPBE, dan sumber daya aparatur.

Tabel 3.1.
Informan Penelitian

No	informan Penelitian	Peran Dalam Penelitian	Jumlah
1.	Ketua Lurah Tanjung Selor Hulu	Memberikan informasi terkait kebijakan, kepemimpinan, dan arah penerapan transformasi digital di kelurahan	1 orang
2.	Sekretaris Kelurahan	Memberikan informasi mengenai pengelolaan administrasi, koordinasi kerja, dan penerapan sistem digital	1 orang

No	informan Penelitian	Peran Dalam Penelitian	Jumlah
3.	ASN/Staf Pelayanan Kelurahan	Memberikan informasi terkait pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital dan kendala teknis	1 orang
4.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	memberikan informasi tentang ketersediaan dan kendala sarana prasarana teknologi informasi.	1 orang
5.	Pengadministrasi Umum	memberikan informasi tentang pelaksanaan pelayanan administrasi berbasis digital.	1 orang
6.	Pengadministrasi Kepegawaian	memberikan informasi tentang pengelolaan data dan administrasi kepegawaian secara digital.	1 orang
7.	Masyarakat Pengguna Layanan	Memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan publik berbasis digital	3 orang
TOTAL			9 orang

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi transformasi digital pada Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hulu. Fokus tersebut diarahkan untuk menggambarkan secara mendalam kondisi aktual ASN sebagai pelaksana utama pelayanan publik berbasis digital di tingkat kelurahan.

Secara lebih rinci, fokus penelitian ini meliputi:

1. Kesiapan Sumber Daya Aparatur

Fokus pada kemampuan dan kesiapan ASN dalam menghadapi transformasi digital, yang mencakup kompetensi digital, pemahaman terhadap kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta kemampuan ASN dalam mengoperasikan teknologi informasi dan aplikasi pelayanan publik.

2. Faktor Pendukung Transformasi Digital

Fokus pada faktor-faktor yang mendukung kesiapan ASN dalam menghadapi transformasi digital, seperti dukungan pimpinan, ketersediaan sarana dan prasarana teknologi, pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN, serta dukungan kebijakan dan regulasi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, mendalam, dan relevan dengan fokus penelitian, yaitu kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi transformasi digital pada Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hulu. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data agar informasi yang diperoleh bersifat komprehensif dan dapat saling melengkapi. Menurut Sugiyono (2019), penggunaan berbagai teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif diperlukan untuk memperkuat keabsahan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang saling melengkapi satu sama lain guna meningkatkan keabsahan data penelitian.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada informan penelitian, yaitu lurah, sekretaris kelurahan, ASN/staf pelayanan, Pengadministrasi Sarana dan Prasarana, Pengadministrasi Umum, Pengadministrasi Kepegawaian, dan Masyarakat Pengguna Layanan sebagai informan pendukung. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pemahaman ASN terhadap transformasi digital, kesiapan dalam menggunakan teknologi, pengalaman dalam penerapan pelayanan berbasis digital, serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi. Wawancara semi terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi di lapangan sehingga data yang diperoleh lebih kaya dan mendalam (Moleong, 2021).

2. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hulu untuk mengamati aktivitas ASN dalam memberikan pelayanan publik, khususnya pelayanan yang memanfaatkan teknologi digital. Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara nyata bagaimana ASN

menggunakan sistem digital, pola kerja aparatur, serta interaksi antara aparatur dan masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dikumpulkan meliputi profil kelurahan, struktur organisasi, laporan kegiatan pelayanan publik, data penggunaan aplikasi pelayanan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transformasi digital dan SPBE. Teknik dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap data primer dan digunakan untuk memperkuat analisis penelitian (Arikunto, 2018).

3.6 Uji Validitas Data

Uji validitas data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Menurut Moleong (2021), validitas data dalam penelitian kualitatif menunjukkan tingkat kepercayaan (credibility) terhadap hasil penelitian, yaitu sejauh mana temuan penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, uji validitas data menjadi bagian penting dalam proses penelitian kualitatif, khususnya dalam penelitian yang mengkaji perilaku, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, uji validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2019), triangulasi merupakan teknik

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Triangulasi bertujuan untuk meningkatkan keakuratan dan kepercayaan data yang diperoleh dari lapangan.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis data dengan cara menggambarkan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam. Menurut Miles dan Huberman (2014), analisis data kualitatif merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data agar peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti secara utuh.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengabstrakan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi transformasi digital, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Data yang tidak berkaitan langsung

dengan fokus penelitian disisihkan, sementara data yang penting dikodekan dan dikelompokkan sesuai tema penelitian.

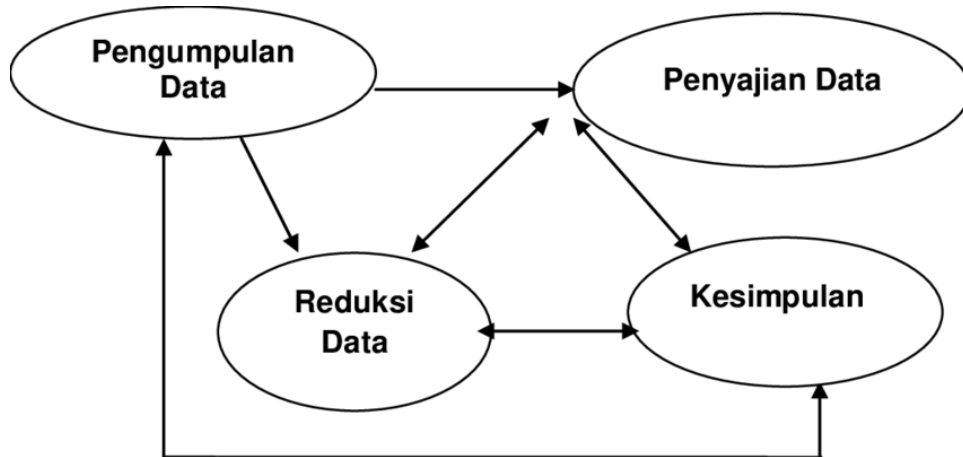
2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bagan yang mudah dipahami. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola, hubungan antar kategori, serta kecenderungan yang muncul dari data penelitian. Dalam penelitian ini, penyajian data digunakan untuk menggambarkan kondisi kesiapan ASN, bentuk penerapan transformasi digital, serta faktor pendukung dan penghambat di Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hulu.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan makna dari data yang telah disajikan. Kesimpulan yang diperoleh bersifat sementara dan terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung dengan cara membandingkan data antar sumber dan teknik pengumpulan data. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didukung oleh data yang valid dan konsisten, sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Gambar 3.1
Teknik Analisis Data



DAFTAR PUSTAKA

- Syamsuddin, Y., Muthalib, A. A., Putera, A., & Asraf, A. (2025). Transformasi Digital dan Kesiapan SDM UPTD PPA Provinsi Sulawesi Tenggara. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 5760–5768. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2861>
- Ahmad Hariri, Wahyuni, W., & Rochmat, A. (2025). Kesiapan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit dalam Menghadapi Transformasi Digital Layanan Kesehatan. *Jurnal Ners*, 9(3), 3837–3845. <https://doi.org/10.31004/jn.v9i3.45936>
- Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. (2024). *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1498-1506. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3519>
- Rahmadi, M. H., & Rusmiati, E. T. (2025). Transformasi digital manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah: Adaptasi, tantangan, dan peluang. *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, 7(2), 113–121. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/5174>
- Islam, F., Fahlevvi, M. R., & Karno. (2025). Transformasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik di era 4.0. *Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek*, 9(2). <https://ejournal.warunayama.org/kohesi>
- Qonita, N. M., Nuraini, A., Damayanti, A., Farida, F. A., Shela, M. P., & Anwar, M. K. (2025). Optimalisasi kesiapan SDM publik menuju transformasi digital pelayanan yang inovatif dan adaptif. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(8). <https://ejournal.cibinstitut.com/index.php/triwikrama>
- Syafitri, I., Nurman, N., Mardatillah, A., & Hefriyenni, R. (2025). Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan Melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD): Studi Kesiapan SDM dalam Era Transformasi Digital di

Provinsi Riau. *PUBLIKA*

<https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/24856>

Qonita, N. M., Nuraini, A., Damayanti, A., Farida, F. A., Shela, M. P., & Anwar, M. K. (2025). OPTIMALISASI KESIAPAN SDM PUBLIK MENUJU TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN YANG INOVATIF DAN ADAPTIF. *Triwikrama*:

<https://ejournal.cibinstititut.com/index.php/triwikrama/article/view/1272>

Sinaga, R. C., Sunarto, E. P., Hafiz, Z., & Aji, P. (2025). Reformasi Birokrasi Melalui Regenerasi Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Birokrasi Yang Transformatif di Era Digital:-. *Journal of Social Contemplativa*, 3(2), 114-125.

Cahyani, A. R., & Idris, M. H. (2025). TANTANGAN TRANSFORMASI DIGITAL: ADAPTASI SISTEM KEARSIPAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA MATARAM.

<http://www.ejurnalstiamataram.ac.id/index.php/tatasejuta/article/view/643>

Susilawati, F. E., Yanti, R., & Erni, E. (2023). Transformasi Digital Pemerintah (Studi Kasus: Implementasi e-Government dan Hambatannya). <https://pusdig.my.id/jss/article/view/338>